

KUASA AKTOR DALAM “DUNIA” PARKIR LIAR

(Studi Kasus Kuasa Aktor dalam ‘Dunia’ Parkir Liar di Sekitar RSUP Dr. Sardjito dengan menggunakan Perspektif Foucauldian dan Gramscian)

Oleh:

Agusniar Rizka Luthfia¹

ABSTRACT

This research aims to find the role of power-actor in the illegal parking underworld around RSUP Dr. Sardjito area. By utilizing Gramscian and Foucauldian discourse analysis, this qualitative research with purposive sampling technique was able to reveal some findings: the power-actor in the illegal parking syndicate around RSUP Dr. Sardjito has been using their influence to establish illegal parking community, as well as its unwritten rules and regulations. The power-actor has the control over the distribution of the parking plots and they decide on who can allowed to work as illegal parking attendants, as well as to assign supervisors –whose role is to initiate and enforce the rules necessary to bind the community together and to protect its existence.

Keywords: *Illegal Parking, Gramscian, Foucauldian, Power-actor.*

1. PENDAHULUAN

Tidak dapat dimungkiri, parkir liar kerap dipandang hanya berkonotasi dengan hal-hal yang bernada negatif. Parkir liar telah diberikan stigmatisasi umum mulai dari penyebab kesemrawutan, pelanggar peraturan hingga pembuat kemacetan jalan. Sekilas memang tidak ada yang menarik dari parkir liar. Terlebih kita mengenal parkir liar adalah parkir yang kondisinya kerap

¹ Mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

dadakan, sporadis serta muncul dalam waktu-waktu tertentu saja semisal ada hajatan berupa pernikahan, pergelaran hiburan dan sebagainya.

Namun, bagaimana bila kita menemukan suatu parkir liar yang telah menetap lama pada suatu wilayah, membangun suatu aturan yang disepakati bersama seperti pembagian wilayah parkir yang tetap serta memiliki berbagai atribut penanda satu dengan lainnya seperti rompi, karcis parkir dan tanda lokasi parkir. Selain itu, para juru parkir liarnya bahkan menjalankan praktik layanan jasa parkir dengan prinsip pelayanan prima kepada konsumen atau pengguna jasa walaupun pada kenyataannya mereka itu adalah parkir liar.

Hal tersebut tentu merupakan sebuah fenomena yang menarik. Fenomena ini dapat ditemukan pada parkir liar di sekitar Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Yogyakarta. Ada pun lokasi beroperasinya parkir liar tersebut adalah jalan yang berada tepat di depan dan sekitar rumah sakit tersebut. Realitas ini pun membuat peneliti semakin tertarik untuk menyelaminya lebih jauh dan lebih dalam berkenaan dengan parkir liar di lokasi tersebut. Mengingat dengan lamanya praktik parkir liar yang telah berjalan di sana dengan berbagai lingkupannya maka sesungguhnya kita dapat melihat dan membaca parkir liar tersebut sebagai sebuah 'masyarakat' tertentu dengan 'dunia' tertentu pula.

Hal-hal tersebut peneliti dapatkan melalui observasi yang cukup lama untuk melihat keunikan parkir liar ini yang apabila kita melihatnya secara sekilas saja tentu tidak dapat terlihat dengan jelas. Lebih lanjut, parkir liar tersebut tentu saja merupakan suatu lahan ekonomi. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan setidaknya potensi pendapatan per hari dari parkir liar di daerah ini mencapai sekitar Rp.160.000-Rp.200.000. Dengan jam operasi rata-rata mulai pukul 07.00 pagi hingga pukul 20.00 malam. Hal tersebut bergantung dari strategis atau tidaknya wilayah parkir yang dijalankan. Melihat potensi ekonomi tersebut sejatinya jelas akan tercipta

adanya persaingan bahkan pertarungan kuasa untuk memperebutkan wilayah parkir yang tersebut terlebih lagi lahan parkir yang tersedia memang terbatas.

Akan tetapi menilik suatu realitas sosial bahwa 'dunia' parkir liar di wilayah ini tampak sudah sedemikian teratur dan seakan tatanan sosialnya telah demikian mapan. Peneliti meyakini ada kuasa aktor atau kekuatan aktor tertentu yang membuat 'dunia' parkir liar di sini sedemikian rapi. Pertarungan kuasa sejatinya ada ada di dalamnya kini dapat berjalan beriringan dan berdampingan secara harmonis untuk terus mengais rezeki dari parkir liar tersebut.

Untuk dapat menggali lebih dalam mengenai kuasa aktor dalam 'dunia' parkir liar di wilayah ini serta memahami bagaimana kuasa bekerja sehingga menciptakan 'masyarakat' parkir liar yang mapan dengan segenap aturannya maka perspektif Gramscian dan Foucauldian jelas akan sangat membantu menjelaskan hal ini menjadi lebih terang.

Dari berbagai lacakan yang dilakukan sangat jarang peneliti yang melihat parkir liar sebagai entitas sosial serupa masyarakat dengan dunia khususnya. Adapun penelitian terdahulu yang berkenaan dengan parkir liar semisal yang dilakukan oleh Cope & Allred (1990), Osoba (2012), Aderamo & Salau (2013), Nugraha (2013), dan Najib (2014) hanya berkisar untuk menelisik parkir liar sebagai sesuatu yang semata negatif semisal penyebab kemacetan, hilangnya potensi pendapatan asli daerah, sebagai bentuk keegoisan individu, menimbulkan keresahan masyarakat, keterlambatan waktu perjalanan dan penambahan biaya perjalanan.

Hal ini dapat dimaklumi karena realitas parkir liar yang demikian banyak di berbagai wilayah di tanah air kerap hanya menimbulkan permasalahan tanpa mampu memberikan suatu sumbangan positif. Terlebih memang keunikan parkir liar layaknya yang berada pada sekitar RSUP Dr. Sardjito ini tidak banyak ditemui di berbagai tempat. Oleh karena itu, parkir

liar ini dapat menjadi suatu kajian menarik melalui pendekatan studi kasus karena kekhasannya.

Sedikitnya referensi maupun informasi yang membahas dan mengulas fenomena parkir liar dengan menguak sisi 'dunia' dalamnya berupa kuasa aktor yang mampu membangun suatu tatanan masyarakat parkir liar yang sedemikian teratur, eksis dan terus bertahan membuat peneliti semakin tertantang untuk melakukan penelitian ini. Ditambah penelitian ini memiliki signifikansi yang penting khususnya berkenaan dengan pengembangan teori sosial berkenaan dengan masyarakat 'liyan' (*the other*) semacam parkir liar ini. Di mana tentunya menyimpan suatu khasanah informasi unik yang akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita akan sebuah realitas sosial yang mungkin kerap terabaikan dan tak diperhatikan. Oleh karena itu, *penelitian studi kasus ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimanakah kuasa aktor dalam 'dunia' parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito.*

2. TELAAH PUSTAKA

Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Pusdiklat Litbang Departemen Perhubungan, 2005; UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Merujuk pada Suwardjoko Warpani, semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama yang disebut parkir (Warpani, 2002). Sementara itu, menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir mendefinisikan parkir sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan menurut Tobing (2007: 1), parkir adalah

suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam peraturan lalu-lintas, yakni "stop" yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara, misalnya stop untuk menurunkan atau menjemput penumpang dengan barang sekadarnya. Jika kendaraan stop, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang pengemudi pergi keluar atau meninggalkan kendaraan, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai stop, tetapi parkir.

On Street Parking dan Off Street Parking

Secara umum parkir dibagi menjadi dua jenis yakni: parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Parkir di tepi jalan/parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Sementara itu, parkir di luar badan jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

Parkir Liar (Illegal Parking)

Berbeda dengan parkir resmi yang dikelola oleh pihak yang berwenang dan sah secara hukum baik itu pemerintah, pemerintah kota atau daerah atau badan yang khusus menangani parkir di mana pendapatannya masuk kepada kas pemerintah. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (RAC Foundation, 2004; Setya, 2013; Harmoko, 2014). Sementara, juru parkir liar

(tidak resmi) adalah juru parkir yang tidak terdaftar di unit pengelola parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya pun tidak resmi (Yanti, 2012: 40). Sebagaimana terlacak pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bawah kata 'liar' ataupun 'ilegal' bermakna tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan (KBBI, 2011). Dari sini observasi yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito merupakan parkir liar berjenis parkir di badan jalan (*on street parking*).

Teori Relasi Kuasa (Michel Foucault): Melacak Kuasa Aktor

Sebagaimana diurai Michel Foucault, kuasa bukanlah kepemilikan. Kuasa bukan kata benda, bukan pula properti. Ini dapat dimaknai bahwa kekuasaan tidak dipunyai, melainkan dipraktikkan. Satu hal yang pasti, kekuasaan itu ada di mana-mana (*omnipresent*) (Foucault, 2002). Dalam pandangan Foucault manusia adalah aktor kekuasaan yang berhubungan tentang episteme sebagai struktur yang menyatukan, dalam artian mengendalikan cara kita memandang dan memahami realitas tanpa kita sadari. Menariknya bahwa episteme hanya berlaku pada satu zaman, dan dapat berubah pada zaman berikutnya (Hardiman, 2007; Baharuddin, 2013). Kembali kepada ranah kuasa, kekuasaan bukanlah suatu struktur politis seperti pemerintah atau kelompok sosial yang dominan, kekuasaan bersifat tersebar dan tidak dapat dilokalisasi, tidak represif, produktif, bukan suatu hal yang dapat diukur. Kekuasaan tidak dapat diperoleh, dibagikan, dan diambil. Kekuasaan hanya dapat terjadi jika tidak adanya kesetaraan. Kekuasaan ada dimana-mana karena kekuasaan terdiri dari individu sebagai pelaku kekuasaan yang merupakan kekuasaan mikro, yang terdapat dalam keluarga, sekolah, lingkungan, kantor, sampai negara (Foucault, 2002). Dalam konteks penelitian ini kuasa aktor pun jelas terdapat dalam ranah parkir liar.

Dalam kehidupan kenegaraan, kuasa mewujud pada ideologi dominan yang mendisiplinkan warga negara dalam struktur diskursif yang dilegitimasi oleh wacana ideologi. Dalam rumah tangga, kuasa diwujudkan dengan praktik bingkai ideologi 'kerumahtanggaan'. Sementara dalam parkir liar, kuasa diwujudkan dengan bingkai ideologi 'keparkirliaran' yang mencakup pembagian wilayah parkir, siapa para juru parkir yang boleh bekerja dan sebagainya. Inilah yang menjadi suatu peran dari apa yang disebut kuasa aktor dalam ranah parkir liar.

Landasan kekuasaan adalah relasi-relasi kekuatan. Secara umum relasi-relasi kekuatan terdiri dari apa saja yang ada dalam interaksi sosial yang mendorong, mendesak, mencegah, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai yang dikehendaki (Foucault, 1977). Interaksi sosial tak lain adalah relasi-relasi kekuatan dalam hal ini kita sebut relasi-relasi kekuasaan, sedangkan relasi-relasi kekuatan itu sendiri dalam konteks interaksi adalah pendorong, pencetus, stimulan, yang disebut Foucault sebagai substrat (*substrate*). Relasi-relasi kekuasaan (*power relations*) tidaklah berada di luar melainkan *immanent* dalam konteks-konteks hubungan yang lain (semisal, ekonomi, pengetahuan, kesehatan, pendidikan, seksualitas, dan sebagainya).

Kekuasaan bukanlah institusi atau struktur, dan juga bukan kapasitas individu, melainkan suatu kompleks keterkaitan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. Kekuasaan pada esensinya adalah diskursif yaitu aturan-aturan (pembatasan-pembatasan) terjalin (terikat) bersama (Foucault, 1977; Foucault, 2002; Lechte, 2001; Bertens, 2006). Seperti dalam parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito tatanan 'aturan' dalam jalinan bersama para juru parkir liar di wadah 'arena' pencarian ekonomi dari parkir liar sudah tertata sedemikian rupa.

Kuasa aktor dalam pandangan Foucault disalurkan melalui hubungan sosial, di mana memproduksi bentuk-bentuk kategorisasi perilaku sebagai baik atau buruk, sebagai bentuk pengendalian perilaku (Hadiyanta, 1997). Sebagai

situs ideologis sekaligus arena, wilayah parkir liar merepresentasikan relasi kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Foucault yang mengatakan bahwa konsep ideologi merupakan istilah yang sama dengan konsep kekuasaan. Pertemuan kekuasaan yang berada di mana-mana termasuk dalam parkir liar. Kuasa tersebut menyentuh seluruh lini struktur sosial dan meresap hingga pada sisi yang paling halus dan dalam pada kehidupan individu dan kelompok (Foucault, 1977; Barker, 2004: 162).

Teori Hegemoni (Antonio Gramsci): Melacak Peran Kuasa Aktor

Teori hegemoni Gramsci adalah salah satu teori politik paling penting pada abad XX. Teori ini dibangun atas premis pentingnya ide dan tidak mencukupinya kekuatan fisik belaka dalam kontrol sosial politik. Di mata Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan "hegemoni" atau menguasai dengan "kepemimpinan moral dan intelektual" secara konsensual (Gramsci dalam Sugiono, 2006: 31). Medan bagi munculnya hegemoni, ialah medan bagi praktik-praktik artikulatoris (Laclau dan Moufe, 2008). Parkir liar merupakan salah satu medan praktik artikulatoris. Pencarian Gramsci untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik mengenai kegagalan sosialisme menuntunnya untuk mengkaji ulang arti penting suprastruktur masyarakat dan menyempurnakan gagasannya tentang hegemoni. Konsep hegemoni, bagi Gramsci, akan menjelaskan mengapa suatu kelompok secara sukarela atau dengan konsensus mau menundukkan diri pada kelompok yang lain (Bellamy dalam Patria & Arief, 2003: 14; Sugiono, 2006: 31).

Sebagaimana pemikiran Antonio Gramsci, bahwa kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni, yang dimaksudkan adalah peran kepemimpinan intelektual dan moral untuk menciptakan ide-ide dominan. Relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak kentara, dalam artian

kekerasan yang ada tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol. Pandangan naturalistik melihat masyarakat sipil sebagai kedaulatan tatanan melalui negara "alami" di mana manusia menemukan diri mereka dalam masyarakat pra-negara (*pre-statal*). Masyarakat sipil, lantas merupakan semacam negara alami, beberapa penafsiran bahkan terkadang melihat masyarakat sipil sebagai negara itu sendiri (Bellamy dalam Patria & Arief, 2003: 14-15).

Dalam hal ini kuasa ruang parkir liar dapat dipahami sebagai suatu kuasa yang tak tampak, dengan meminjam konsep hegemoni Gramsci. Gramsci juga mengkarakterisasikan hegemoni dalam istilah "pengaruh kultural", tidak hanya "kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi". Dalam pandangan Gramsci unsur ekonomi bukanlah satu-satunya determinan dalam perubahan sosial karena ada signifikansi masuknya ide-ide dominan kelompok-kelompok berkuasa dan kebudayaan yang merupakan faktor non-ekonomi.

Gramsci tidak menyangkal kemungkinan digunakannya kekuatan koersi, namun menolak bahwa kekuatan sebagai satu-satunya fondasi di mana dominasi kelompok ditegakkan. Sebaliknya ia justru berpendapat bahwa penggunaan kekuatan hanyalah salah satu dari bermacam-macam bentuk kekuasaan. Pandangan Gramsci mengenai pentingnya kepemimpinan kultural ini membuatnya mempertimbangkan kembali konsep "suprastruktur" Marxian. Tetapi bukannya memandang suprastruktur sebagai epifenomena semata, yakni refleksi semata dari elemen ekonomi sub/struktur, ia justru mengkarakteristikkan superstruktur sebagai penting dengan sendirinya. Ia memilah pengertian suprastruktur menjadi "dua level struktur utama": tingkat pertama ia sebut "masyarakat sipil", lainnya adalah "masyarakat politik" atau "negara" (Gramsci, 1971: 12). Dalam konsepsi Gramsci "masyarakat sipil" mencakup seluruh aparatus transmisi yang lazim disebut "swasta" seperti universitas, sekolah, media massa, gereja dan lain sebagainya. Karena aparatus-aparatus tersebut memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk kesadaran massa, maka kemampuan kelompok (kelompok)

berkuasa dalam melestarikan kontrol sosial dan politiknya atas kelompok-kelompok lain sepenuhnya tergantung pada kemampuannya mengontrol aparatus-aparatus tadi. Yang dimaksud Gramsci dengan "masyarakat politik", sebaliknya, adalah semua institusi publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan "perintah". Termasuk dalam kategori ini adalah polisi, birokrasi, pemerintah. Dengan kata lain, Gramsci mempersamakan masyarakat politik dengan semua institusi yang biasa disebut sebagai negara atau negara itu sendiri (Gramsci, 1971: 12).

Ada empat hal penting dalam teori Gramsci. *Pertama*, Gramsci berpendapat bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat pluralitas ideologi. *Kedua*, konflik bisa terjadi tidak hanya antarkelas, tetapi konflik antara kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan yang bersifat global (umum) untuk mendapatkan kontrol ideologi dan politik terhadap masyarakat. *Ketiga*, Gramsci mengatakan bahwa untuk menjadi kelompok dominan harus berkoordinasi, memperluas, dan mengembangkan kepentingan-kepentingan umum kelompok *sublatern*. Kata kunci dari pemahaman teori hegemoni Gramsci adalah negosiasi yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus semua kelompok. *Keempat*, Gramsci berpandangan bahwa ekonomi informal merupakan bagian dari masyarakat sipil.

Berpijak pada Gramsci, parkir liar dapat dikategorikan sebagai ekonomi informal karena tarikan ekonomi jelas sangat terlihat di dalamnya. Kemudian berkenaan dengan hadirnya 'masyarakat' dengan segenap dunia keparkirliaran semisal tatanan 'aturan' yang berlaku merupakan sebuah konsekuensi dari adanya hubungan kekuatan. Dari kacamata Gramsci kita dapat melakukan analisis bahwa hubungan kekuatan yang dilakukan melalui aktivitas tertentu benar-benar membentuk suatu. Kita dapat melihat adanya hubungan kekuatan. Seperti diungkapkan Gramsci "Hubungan-hubungan kekuatan mungkin akan menguntungkan, namun juga mungkin tidak menguntungkan, terhadap tendensi ini atau itu" (Gramsci, 2013: 248).

Lebih jauh Gramsci mengatakan hubungan antar kekuatan setidaknya memiliki dua prinsip. Pertama, tidak ada masyarakat yang menetapkan kewajiban dalam kondisi yang belum eksis atau baru muncul dan baru berkembang. Kedua, tidak ada masyarakat macet dan diganti sampai masyarakat tersebut mengembangkan semua bentuk kehidupan yang sudah dijelaskan dalam hubungan internalnya (Gramsci, 2013: 243). Akan tetapi, dalam proses berjalan akan terjadi apa yang dinamakan perang posisi. Perang posisi *mengandaikan* keterbelahan ruang sosial menjadi dua kubu dan menjadikan artikulasi hegemonik sebagai suatu logika mobilitas dari gerak garis perbatasan yang memisahkan kedua kubu itu (Laclau dan Mouffe, 2008: 206).

Ini sejalan dengan pemikiran Gramsci bahwa setiap formasi sosial dengan sendirinya akan terstruktur di seputar pusat hegemonik (Gramsci, 2013). Dalam pandangan Gramsci perwujudan/pengkristalan personel yang memimpin—yang menggunakan kekuasaan untuk melakukan suatu praktik tindakan. Pada suatu titik tertentu akan menjadi suatu kasta (Gramsci, 2013: 342-343).

Benang merah dari pemikiran Foucault dan Gramsci yang menjadi sumbangan bagi penelitian ini adalah kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan (sosial) dalam masyarakat. Selain itu, kekuasaan yang hadir tentu dijalankan dan dipraktikkan oleh suatu aktor yang mampu memerankannya. Peran aktor di sini sebagaimana diungkapkan Gramsci (2013: 255) adalah menjamin terbentuknya kekuatan secara sistematis, kemudian dikembangkan dan diubah menjadi lebih homogen, kompak dan waspada. Oleh sebab itu, penelitian ini pun menggunakan perspektif Foucauldian dan Gramscian dalam memotret kuasa aktor yang berperan dalam 'dunia' parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito ini untuk menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat yang berada dalam kelompok juru parkir liar menjadi terpengaruh karena adanya persetujuan tidak kentara antar mereka.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di sekitar Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito atau tepatnya berada sepanjang jalan Kesehatan di depan RSUP tersebut di mana terdapat praktik parkir liar. Parkir liar ini menempati badan jalan atau biasa disebut *on street parking*. Sementara itu, keberadaan parkir liar ini secara administratif terletak di Desa Sedowo Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami situasi, peristiwa, kelompok, ataupun interaksi sosial tertentu pada *setting* alamiah (Creswell, 2013: 26-27).

Dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus instrinsik (yang fokusnya adalah pada kasus itu sendiri, karena dianggap unik atau tidak biasa) mengenai parkir liar yang telah eksis demikian lama dengan tatanan 'aturan' yang sedemikian rupa dengan fokus mengenai kuasa aktor dalam 'dunia' parkir liar di di sekitar RSUP Dr. Sardjito (Creswell, 2014: ix-x). Sumber primer atau informan/narasumber dalam penelitian ini adalah para juru parkir sementara sumber sekunder berupa penelitian terdahulu, buku, majalah, jurnal, surat kabar dan berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengambilan sampel/cuplikan yang digunakan adalah *purposive sampling* (Creswell, 2014) dipadukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interviewing*), studi literatur maupun observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini (Denzin & Lincoln, 1994). Sementara, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang melibatkan berbagai komponen yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992). Dan, teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data/sumber (Creswell, 2013).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat dimungkiri lagi, parkir liar di sekitar Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito memiliki keunikan tersendiri yakni parkir liar ini telah ada (eksis) selama bertahun-tahun. Parkir liar ini layaknya telah membangun sebuah 'masyarakat' dengan berbagai tatanan 'aturan' yang telah disepakati bersama dan dilaksanakan bersama. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama sekitar 6 bulan lamanya, para juru parkir liar tersebut telah menjalankan suatu tatanan 'aturan' kesepakatan baik itu dari pengelolaan wilayah/daerah/petak parkir, menggunakan atribut dan identitas parkirnya masing-masing sebagai ciri khas wilayah parkirnya seperti karcis parkir, baju parkir serta tanda tempat/lokasi parkir hingga kesepakatan harga tarif parkir Rp.2000 untuk motor dan Rp.5000 untuk mobil.

Semua 'aturan' kesepakatan itu telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan harmonis dalam artian semua petak/wilayah parkir di lokasi tersebut jumlahnya tetap serta tidak berkurang apalagi bertambah begitu pula dengan para juru parkirnya tidak ada penambahan baru lagi. Padahal yang namanya lahan ekonomi atau tempat mengais rezeki apalagi seperti parkir liar ini tentu saja akan muncul suatu persaingan atau pertarungan untuk saling memperebutkan 'kue' ekonomi sebagaimana diketahui potensi pendapatan (omzet) dari parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito mencapai ratusan ribu rupiah.

Dalam kacamata Foucault (1977) jelas pada parkir liar ini telah hadir suatu pertarungan kuasa dalam hubungan sosial atau interaksi sosial didalamnya. Namun, memang seperti diungkapkan Gramsci pertarungan kuasa itu telah didapat diatur sedemikian rupa oleh kelompok atau individu yang memiliki kemampuan melakukannya yakni kuasa aktor. Gramsci menilainya sebagai hubungan kekuatan. Dari pandangan Gramsci kita dapat melakukan analisis bahwa hubungan kekuatan yang dilakukan melalui aktivitas tertentu benar-benar membentuk suatu. Kita dapat melihat adanya hubungan kekuatan.

Seperti diungkapkan Gramsci "Hubungan-hubungan kekuatan mungkin akan menguntungkan, namun juga mungkin tidak menguntungkan, terhadap tendensi ini atau itu" (Gramsci, 2013: 248).

Lebih jauh Gramsci mengatakan hubungan antar kekuatan setidaknya memiliki dua prinsip. Pertama, tidak ada masyarakat yang menetapkan kewajiban dalam kondisi yang belum eksis atau baru muncul dan baru berkembang. Kedua, tidak ada masyarakat macet dan diganti sampai masyarakat tersebut mengembangkan semua bentuk kehidupan yang sudah dijelaskan dalam hubungan internalnya (Gramsci, 2013: 243).

Dari sini kita dapat melakukan analisis dan pembacaan bahwa dalam 'dunia' parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito ada suatu hubungan kekuatan dalam artian hubungan antar aktor yakni para juru parkir liar yang menghasilkan keuntungan yakni mereka dapat memperoleh 'kue' ekonomi dari lahan parkir yang mereka usahakan bersama. Selain itu, mereka pun membangun suatu kewajiban bersama berbagai tata 'aturan' seperti telah diuraikan diuraikan di atas karena masyarakat mereka sebagaimana dikatakan Gramsci telah eksis dan berkembang demikian lama selama bertahun-tahun dan bukan sekadar masyarakat yang baru tumbuh.

Oleh karena itu, tentu akan sangat menarik untuk melihat bagaimana kuasa aktor dalam 'dunia' parkir liar ini mampu menjalankan dan mengharmoniskan hubungan antar kekuatan yang menghasilkan suatu keuntungan bersama seperti diungkapkan Foucault dan Gramsci. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi peneliti di lapangan terdapat temuan-temuan menarik mengenai kuasa aktor dalam 'dunia' parkir liar ini. Dari berbagai aktor yang ada tersebut (khususnya dalam hal ini dalam internal parkir liar) sebagai fokus penelitian ini maka dapat dikatakan Pak Sardjono merupakan aktor yang memiliki pengaruh atau kuasa paling besar dalam 'dunia' parkir liar ini apabila dilihat dari perspektif Foucault. Ia melakukan inisiasi maupun gagasan yang kemudian diadopsi dan diafirmasi oleh para aktor

lainnya layaknya sebagaimana hegemoni dalam pandangan Gramsci. Selain itu, ia memiliki kekuatan lain yakni sebagai penduduk asli Desa Sedowo. Untuk melihat gambaran akan kuasa aktor yang lebih lengkap maka temuan-temuan tersebut peneliti tematisasi dan kategorisasi sebagai berikut:

A. Pembagian Wilayah/Petak/Patok Parkir

Pembagian wilayah/petak parkir sejatinya merupakan sesuatu hal yang sensitif dan dapat menimbulkan kecemburuan karena berkaitan dengan 'kue' ekonomi atau pendapatan (omzet) dari jasa parkir liar. Namun, demikian kuasa aktor dapat melakukan peredaman dengan segala kekuatan atau kuasa yang dimilikinya atau dengan kata lain aktor lain hanya mampu melakukan suatu afirmasi persetujuan mengenai hal yang telah ditentukan tersebut. Petak/wilayah parkir di sekitar RSUP Dr. Sardjito ini dibagi menjadi delapan wilayah. Jumlah ini tetap. Petak parkir tidak boleh bertukar atau berganti serta tidak boleh ada kecemburuan terkait petak parkir tersebut. Hal ini sebagaimana diutarakan Pak Sardjono dalam kutipan berikut ini:

"Petak parkir di sini kita bagi sampai delapan kelompok yang masing-masing ada pemimpinnya..kalau ada sesuatu antar kelompok yaa tetap ngobrol tapi wilayahnya tetap. Tidak boleh ganti-gantian harus sesuai wilayahnya Mbak...Iya..kalau parkir ini yaa buat selamanya mbak..nggak ada iri-irian nggak ada itu.."
(Wawancara, 25 November 2014).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak Anggoro kalau mereka, siapa pun yang menjadi juru parkir liar harus mengerti akan wilayahnya sehingga tidak ada pergesekan antar juru parkir liar. *"Yaa kita kan emang sudah harus ngerti Mbak, misale yang jelas seperti bapake ini kan wilayahnya dari patok sini sampai patok sini. Saya dari sini sampai sini begitu Mbak"* (Wawancara, 20 November 2014). Pembagian wilayah ini sendiri pun sudah disadari sebagai sebuah kesepakatan bersama. Ini seperti petikan wawancara dengan Pak Khomis, *"Ini kalau wilayahnya..yaa petak-petak parkir itu hasil kesepakatan Mbak"* (Wawancara, 20 November 2014).

Awal mula kesepakatan petak-petak parkir ini adalah hasil inisiasi Pak Sardjono yang mengajak pemuda-pemuda di wilayah Desa Sedowo. Ia yang menawarkan parkir liar kepada pemuda di wilayah tersebut sebagai sarana untuk menghindari pengangguran.

“Saya ini kalau lihat anak-anak di kampung itu nganggur ya mending saya ajak ke sini. Saya di jalan ini ya..kamu di sana, kamu di sana. Kalau anak-anak seperti Mas Geger, rawan lama-lama Mbak kalau tidak ada pekerjaan..Kalau sini dilarang untuk parkir harusnya ada solusi buat anak-anak itu bekerja. Tapi nyatanya ini memang susah kan. Ya to? terus jalan keluarnya gimana? Supaya mereka bisa bekerja ya saya ajak kelola parkir liar ini” (Wawancara, 25 November 2014).

Seperti telah diungkapkan di atas, pembagian petak wilayah parkir ini sudah final dan tidak akan berubah apalagi bertambah. Namun, walaupun demikian nyatanya memang ada saja beberapa kalangan yang meminta ijin dari Pak Sardjono untuk membuka lahan parkir liar baru. Akan tetapi, semua itu ditolaknya karena ‘tatanan’ parkir liar sudah baik lagi pula memang sudah tidak ada tempat lagi.

“Iya..ada yang bilang mau minta ijin buka lahan parkir liar baru. Nah, lha saya bilang ini udah lama begini pembagiannya..udah final..udah nggak ada tempat, nggak ada tambahan lagi. Kalau ada warga setempat yang mau masuk ya harus sudah ada jatahnya, kalau nggak ada jatahnya ya nggak bisa. Udah nggak ada yang baru. Maksudnya dari orang yang dulu udah punya wilayah parkir itu gantikan dia. Kalau nggak ada jatahnya ya nggak bisa jadi sudah tidak bisa lagi ada orang yang baru” (Wawancara, 25 November 2014).

Dalam pembagian wilayah parkir liar ini memang sudah tidak tersisa ruang lagi bagi para juru parkir liar yang baru untuk membuka lahan. Seperti dinyatakan Pak Sardjono di atas kalau sudah ada jatahnya baru bisa digantikan. Semisal diwariskan ke anaknya. Dari sini kita dapat melihat parkir liar di daerah ini pun menggunakan model pewarisan wilayah parkir. Hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk upaya pelanggengan kuasa. Semisal ada pemilik wilayah parkir yang meninggal dunia maka dengan otomatis wilayah

tersebut diwariskan ke anak atau keluarganya. Sebagaimana dituturkan Bapak Sardjono berikut ini, *"Kalau di sini ada pemilik wilayah parkir yang meninggal yaa diwariskan ke anaknya. Dan biasanya yaa anaknya itu yang menggantikannya"* (Wawancara, 25 November 2014).

B. Siapa yang Boleh Bekerja (Jadi Juru Parkir Liar)

Dengan potensi pendapatan ekonomi dari parkir liar di di sekitar RSUP Dr. Sardjito tentu banyak kalangan yang berminat untuk turut menjadi juru parkir liar. Terlebih memang kawasan ini merupakan wilayah yang tidak pernah sepi potensi para pengguna jasa parkir mengingat ruang parkir di dalam RSUP Dr. Sardjito memang tidak mencukupi. Mengenai siapa yang boleh bekerja menjadi juru parkir liar di wilayah ini pun tidak dapat sembarangan karena ada kuasa aktor pula yang menentukan mengenai hal ini.

Pada dasarnya yang boleh menjadi juru parkir di wilayah ini adalah warga atau penduduk asli Desa Sedowo. Namun, ada satu orang yang berasal dari luar daerah yakni dari Madura dan boleh menjadi juru parkir liar. Pak Khomis adalah orang yang dimaksud. Ini pun dengan beberapa pertimbangan yang ada. Semisal rasa kasihan/iba karena orang tersebut memiliki tanggungan keluarga di mana masih memiliki anak kecil sementara usia Pak Khomis sudah sangat tua. Selain itu, istrinya pun memiliki keterbelakangan mental. Faktor lain adalah karena Pak Khomis merupakan pionir atau orang yang pertama kali membuka parkir liar di wilayah ini. Mengenai siapa yang boleh bekerja sebagai juru parkir liar di wilayah ini Pak Sardjono mengutarakannya dalam petikan wawancara berikut ini:

"Yang namanya parkir itu kan yaa buat orang daerah asli sini. Ini yang didahulukan Mbak. Di mana-mana ya kalau parkir itu ya yang punya warga daerahnya to? di mana-mana ya kayak gitu.." (Wawancara, 25 November 2014).

Adapun mengenai keberadaan Pak Khomis sebagai juru parkir liar yang notabeneanya bukan berasal dari warga asli daerah atau warga Desa Sedowo. Pak Sardjono mengungkapkan bahwa itu memang diberikan jatah petak wilayah untuk parkir karena rasa iba/kasih.

“Ya itu dikasih, dikasih. Dulu sebenarnya dia udah duluan parkir kayak gini, udah dari muda. Tapi kan dia bukan asli daerah sini to Mbak. Dia itu rumahnya ya pindah-pindah.. Kalau di sini yaa cuma pak tua itu..itu udah lama sebenarnya. Kasihan soalnya istrinya kan juga nggak waras. Anaknya juga masih kecil. Kasihan itu, makanya kita nggak papalah. Wong cari nafkah juga. Nggak papalah, kita juga punya hati Mbak” (Wawancara, 25 November 2014).

Apa yang diutarakan Pak Sardjono mengenai siapa yang boleh menjadi juru parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito serta kasus khusus Pak Khomis pun mendapatkan afirmasi dari Pak Anggoro bahwa orang luar daerah Desa Sedowo yang boleh menjadi juru parkir liar itu memang hanya Pak Khomis. Adapun yang boleh menjadi juru parkir liar itu utamanya harus orang asli daerah tersebut.

“Dia kan bukan orang sini. Di mana-mana parkirannya itu kan yang diutamakan orang daerah kan Mbak..Orangnya itu ya cuma itu tok. Ya cuma satu itu tok. Pak Khomis itu aja” (Wawancara, 20 November 2014).

Penentuan mengenai siapa yang boleh menjadi juru parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito memang melibatkan kuasa aktor yang memiliki pengaruh besar didalamnya. Namun, alasan penentuan lain pun masih berpijak pada apa yang dinamakan kuasa daerah setempat. ‘Klaim’ hak utama dari warga asli pribumi atau desa setempat turut menentukan mengenai siapa yang boleh menjadi juru parkir liar atau tidak.

Dari sini kita dapat melihat salah satu hal yang telah menjadi kesepakatan dan kesepahaman bersama bahwa area parkir di suatu daerah keramaian adalah usaha milik penduduk setempat. Secara terselubung telah terjadi penguasaan ruang parkir liar oleh pihak tertentu. Padahal orang

pertama yang menguasai parkir sepanjang jalan RSUP Dr. Sardjito adalah Pak Khomis (Wawancara, 20 November 2014). Saat ini Pak Khomis mendapatkan lahan parkir sepanjang kira-kira 60 meter, itupun ditambah perlakuan berbeda karena ia bukan berasal dari penduduk setempat. Dalam bahasa Gramsci ini sesungguhnya telah terjadi apa yang dinamakan perang posisi yang mengandaikan keterbelahan ruang sosial menjadi dua kubu (pribumi dan non pribumi atau warga asli dan warga pendatang) dan menjadikan artikulasi hegemonik sebagai suatu logika mobilitas dari gerak garis perbatasan yang memisahkan kedua kubu itu (Gramsci, 2013; Laclau dan Mouffe, 2008: 206).

C. Pengawas, Inisiator Tatanan 'Aturan' dan Kekompakan Parkir Liar

Kuasa aktor sebagai mana diungkapkan Gramsci dalam konteks parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito adalah melakukan pengawasan atau pantauan, menjamin terbentuknya suatu tatanan kekuatan yang sistematis dan membuatnya menjadi lebih homogen serta kompak. Hal ini jelas terlihat apabila kita mencoba menyelami akan masyarakat parkir liar di wilayah tersebut. Ini pula yang menjadikannya memiliki keunikan tersendiri dan membedakannya dari parkir liar-parkir liar lain yang hanya muncul secara sporadis dan tidak memiliki tatanan 'aturan' sebagaimana dipunyai 'dunia' parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito.

Berkenaan dengan kuasa aktor yakni berperan sebagai pengawas atau pemantau jalannya suatu praktik parkir liar di wilayah ini adalah untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik dan jangan ada sampai ada permasalahan. Dan sekalipun ada permasalahan maka hal tersebut dapat segera dipecahkan. Sang aktor sendiri walaupun memiliki petak/wilayah parkir liar namun baru dua bulan ini ikut memarkir. Hal ini tergambar dalam petikan wawancara berikut ini.

"Saya cuma mantau Mbak..Pantau kalau ada apa-apa saya bisa turun Mbak. Saya sendiri punya wilayah parkir..ya di sini ini tapi saya tidak ikut hanya mengawasi aja yaa baru dua bulan ini saya

ikut parkir..Terus kalau memang ada ya itu kita pecahkan bersama. Ini daerah kita, ini lahan kita jangan sampai ada masalah. Kalau ini ya diarahkan kemana..Intinya kita pastikan semua baik Mbak di seluruh wilayah parkir ini” (Wawancara, 25 November 2014).

Selain itu, Pak Sardjono pun merupakan inisiator munculnya berbagai tatanan ‘aturan’ yang akhirnya diterima dan disepakati sebagai bersama seluruh masyarakat parkir liar di wilayah ini. Sebut saja semisal penyeragaman harga tarif parkir bagi kendaraan motor sebesar Rp.2000 dan mobil Rp.5000. Selain itu, tatanan ‘aturan’ lain untuk menjaga kekompakkan adalah uang kas untuk identitas semisal kartu parkir, seragam. Adapun kreasi seperti pilihan warna seragam diserahkan kepada masing-masing kelompok parkir tersebut. Maka tak heran, berdasarkan pengamatan, peneliti melihat warna seragam parkir yang berbeda-beda seperti warna orange hingga hitam. Namun, mereka semua sejatinya merupakan satu keluarga besar masyarakat parkir liar.

“Lha kan saya yang mengatur ini anak-anak. Saya juga mengawali adanya uang kas..satu harinya 15.000 ya misalnya untuk identitas, untuk kartu, atau untuk beli seragam.. atau ya terserah nanti untuk apa. Mbak bisa lihat kan itu ada yang seragamnya orange seperti kelompok Pak Khomis. Kalau kelompok saya seragamnya hitam..Kalau warnanya apa yaa terserah kelompok masing-masing no, ini ya biar kompak saja..sama juga buat tarif parkir kita samakan pokoknya motor itu 2.000 kalau mobil 5.000 begitu Mbak (Wawancara, 25 November 2014).

Selain itu, dalam suatu petak/wilayah atau dalam satu kelompok parkir biasanya terdiri dari beberapa orang mulai dari dua hingga enam orang. Banyak jumlah orang dalam kelompok parkir di petak tertentu tergantung dari kebijakan pemimpinnya. Semisal di petak Pak Khomis ada dua orang yakni dirinya dan Pak Anggoro. Sementara di petak Pak Sardjono ada enam orang. Dalam sistem kerja parkir liar mereka pun ada yang bekerja bersama-sama hingga menerapkan sistem shift atau waktu bergantian.

Kelompok Pak Khomis bersama Pak Anggoro misalnya melakukan pekerjaan sebagai juru parkir liar secara bersama sama dan hasil pendapatan dari parkir tersebut mereka bagi menjadi dua.

"Saya berdua Mbak dengan Bapak itu lho namanya Pak Anggoro (sambil menunjuk jukir yang lebih muda/ kira-kira berusia 35an yang sedang sibuk memarkir kendaraan). Di sini kita berdua saja..kalau dapat uang berapa ya kita bagi berdua saja Mbak" (Wawancara, 20 November 2014).

Sementara itu, pada kelompok Pak Lippo, sistem kerja kelompoknya menggunakan sistem shift atau pergantian. Ada shift pagi sampai sore kemudian bergantian dilanjut shift sore sampai malam. Namun, hasil pendapatannya digabung dan kemudian akan dibagi rata. Seperti diungkapkan Pak Lippo berikut ini:

"Ya kalau kami sistemnya shift tapi bagi rata..Saya di sini dari pagi sampai sore.. nanti ada yang ngganti dari sore sampai malam Mbak. Masing-masing kelompok punya sistem sendiri-sendiri jadi itu terserah kelompok" (Wawancara, 20 November 2014).

Masing-masing kelompok parkir liar di wilayah ini dapat mengelola wilayah parkirnya sendiri asalkan tidak berbenturan dengan aturan bersama yang lebih besar semisal tentang luas patok parkir yang telah disepakati masing-masing kelompok di mana ini tidak dapat berubah dan sudah final. Ini seperti diungkapkan Pak Khomis dalam petikan wawancara berikut.

"Yang ngelola di sini ya cuma saya sama Pak Anggoro itu.. sendiri-sendiri kita kelola..masing-masing kelompok itu jalan sendiri-sendiri di petaknya mbak. Saya di sini sak notonya Mbak. Kalau wilayahnya luasnya berapa itu sudah kesepakatan nggak boleh dilanggar. Semua juga udah tahu itu Mbak. Masing-masing udah ada jatahnya begitu" (Wawancara, 20 November 2014).

5. KESIMPULAN

Dari hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kuasa aktor dalam 'dunia' parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito telah memainkan kuasa yang dimilikinya untuk membentuk masyarakat parkir liar dengan segenap tatanan 'aturan' yang sedemikian rupa. Hal ini sebagaimana diutarakan Foucault bahwa kuasa itu dapat berada di mana-mana termasuk di sini adalah parkir liar. Kuasa itu sendiri yang jelas adalah dipraktikkan. Kuasa dapat menyentuh ke berbagai lini kehidupan maupun struktur sosial dan meresap hingga pada sisi yang paling halus dan dalam pada kehidupan individu dan kelompok. Kuasa sendiri sebagaimana diuraikan Foucault dan Gramsci hadir dalam hubungan sosial (interaksi sosial).

Kuasa aktor dalam 'dunia' parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito sendiri berpijak dari perspektif Gramsci antara lain berperan pada ranah pembagian wilayah/petak/patok parkir, menentukan siapa yang boleh bekerja sebagai juru parkir liar di wilayah tersebut serta menjadi pengawas sekaligus inisiator tatanan 'aturan' yang diperlukan untuk menjadi kekompakan masyarakat parkir liar yang ada. Kuasa aktor ini menelusup dan kemudian diamini serta diafirmasi oleh aktor-aktor lain dalam 'dunia' parkir liar di sekitar RSUP Dr. Sardjito ini. Dalam perspektif Gramsci kita dapat melihat bahwasanya kuasa aktor di sini adalah berupaya membentuk suatu kekuatan sistematis, yang kemudian dikembangkan dalam masyarakat parkir liar serta menjadikan masyarakat parkir liar tersebut lebih homogen, kompak dan senantiasa waspada. Ini dapat kita lihat dari penentuan tarif parkir yang seragam serta adanya suatu identitas dan berbagai atribut dari kelompok parkir liar di wilayah ini. Di mana masyarakat parkir liar selalu waspada untuk menciptakan kondisi agar tetap baik, aman dan nyaman sehingga mereka dapat terus mengais pendapatan ekonomi dari parkir liar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aderamo, A.J. & K.A. Salau. 2013. "Parking Patterns and Problems in Developing Countries: A Case from Ilorin, Nigeria". *African Journal of Engineering Research*, Vol. 1 No. 2, hlm. 40-48.
- Baharuddin, Alimuddin. 2013. Uang, Pengetahuan dan Kekuasaan. *News Letter Rumah Pemilu*. Edisi September. *Ahmadi*, Abu. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies. Teori & Praktik*. Terj. Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Bertens, K. 2006. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia.
- Cope, John G. And Linda J. Allred. 1990. "Illegal Parking in Handicapped Zones: Demographic Observations and Review of the Literature," *Rehabilitation Psychology*, Vol. 35(4), pp. 249-257.
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Terj. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terj. Achmad Fawaid. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. (eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish*. London: Tavistock Publications Limited.

- Foucault, Michel. 2002. *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: Qalam.
- Foucault, Michel. 2002. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Gramsci, Antonio. 2013. *Prison Notebooks: Catatan-Catatan dari Penjara*. Terj. Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, F. Budi. 2007. *Filsafat Modern: Dari Machiacelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia.
- Harmoko. 2014. "Balap Liar, Parkir Liar," <http://poskotanews.com/2014/09/11/balap-liar-parkir-liar/>, 20 November 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2011. Jakarta: Balai Pustaka.
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Post Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Lechte, John. 2001. *50 Filsuf Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius.
- Miles, Matthew B. Dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Najib, Mochamad. 2014. "Politisasi Parkir Berlangganan," *Jurnal Politik Muda*, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, hlm. 446-458.
- Nugraha, Pri Guna. 2013. "Studi Tentang Peran Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda," *eJournal Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 4, 2013, pp. 1495-1510.

- Osoba, Samson Babatunde. 2012. "Appraisal of Parking Problems and Traffic Management Measures in Central Business District in Lagos, Nigeria". *Journal of Sustainable Development*, Vol. 5, No. 8, pp. 105-115.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusdiklat Litbang Departemen Perhubungan. 2005. *Sistem Transportasi Nasional*. Jakarta: Kementrian Perhubungan.
- RAC Foundation. 2004. 'Parking in Transport Policy'. London, Pall Mall: RAC Foundation.
- Setya, Agus. 2013. "Tukang Parkir Liar". <http://agussetya.blogspot.com/2013/09/tukang-parkir-liar.html>, 10 November 2014.
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo, HB. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tobing, David M.L. . 2007. *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Timpaui Agung.
- Warpani, Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Yanti, Riri. 2012. "Juru Parkir di Kota Makassar (Suatu Studi Antropologi Perkotaan)". Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.